

LITERASI PAJAK DAN KEUANGAN : OPTIMALISASI PENINGKATAN KOMPETENSI UMKM DI JAYAPURA

Meinarni Asnawi, Ulfah Rizky Muslimin

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cenderawasih

ABSTRACT

This community service aims to provide knowledge about digitalization in the field of taxation and business for UMKM in Jayapura. The change in the business world towards the era of information technology is a progress that has been going on for approximately 10 years. The Covid-19 pandemic has made business activities change so fast and allowed all lines of business to develop, including UMKM sector. Introducing digitalization and taxes is important for UMKM to prepare themselves to develop their business potential. The process of financial recording and reporting, digital business design and the benefits of being a taxpayer are the main materials provided for UMKM. Public services are focused on three materials, namely tax digitalization literacy, financial digitalization literacy, and business digitalization. Tax literacy introduces UMKM to the benefits of taxes and the procedures also methods of becoming a taxpayer. Business literacy focuses on the introduction of information technology-based financial records and business digitalization. The participants of this service are UMKM in Jayapura City and Accounting students who are doing KKN and become UMKM companions. The teaching method is carried out online with 48 participants then the mentoring process is carried out by KKN students to ensure that the material presented can be applied in the efforts of UMKM members. Through learning methods that are delivered directly to experts in their fields and followed by a mentoring process, knowledge transfer occurs and UMKM can develop their businesses.

Keywords : *Keywords : literacy of finance, taxation, and competency of business*

ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang digitalisasi dibidang perpajakan dan bisnis bagi UMKM di Jayapura. Perubahan dunia bisnis menuju era teknologi informasi merupakan kemajuan yang telah berlangsung selama kurang lebih 10 tahun. Pandemi Covid-19 membuat aktivitas bisnis berubah begitu cepat dan memungkinkan semua lini bisnis berkembang, termasuk UMKM. Memperkenalkan digitalisasi dan pajak penting bagi UMKM untuk mempersiapkan diri mengembangkan potensi usahanya. Proses pencatatan dan pelaporan keuangan, perancangan bisnis secara digital serta manfaat menjadi wajib pajak menjadi materi utama yang diberikan bagi UMKM. Pelayanan publik difokuskan pada tiga materi, yaitu literasi digitalisasi pajak, literasi digitalisasi keuangan, dan digitalisasi bisnis. Literasi pajak mengenalkan UMKM pada manfaat pajak serta tata cara dan cara menjadi wajib pajak. Literasi bisnis berfokus pada pengenalan catatan keuangan berbasis teknologi informasi dan digitalisasi bisnis. Peserta pengabdian ini adalah UMKM di Kota Jayapura dan Mahasiswa Akuntansi yang sedang melakukan KKN dan menjadi pendamping UMKM. Metode pengajaran dilakukan secara online dengan jumlah peserta 48 orang kemudian proses pendampingan dilakukan oleh mahasiswa KKN untuk memastikan materi yang disampaikan dapat diterapkan dalam usaha anggota UMKM. Melalui metode pembelajaran yang disampaikan langsung kepada para ahli dibidangnya dan diikuti dengan proses pendampingan, terjadi transfer ilmu dan UMKM dapat mengembangkan usahanya.

Kata kunci: literasi keuangan, perpajakan, dan kompetensi usaha

1. Pendahuluan

Pandemi Virus Covid-19 telah berdampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan, mulai dari aspek sosial, politik, sampai ke aspek stabilitas ekonomi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Serangan pandemi ini juga sangat mempengaruhi produktivitas masyarakat dalam melaksanakan aktifitas dan tugas-tugasnya setiap hari baik itu pekerja, pelajar, mahasiswa, pengusaha dan masyarakat umum lainnya (Mar'linah, 2020). Dampak negatif akibat wabah Covid-19 ini menghambat roda pergerakan bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia. Banyak UMKM yang terpaksa tidak bisa menjalankan bisnisnya, karena harus mengikuti berbagai kebijakan pemerintah terkait dengan pembatasan aktivitas bisnis dan masyarakat untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Kondisi di atas memungkinkan UMKM ikut terdampak dan turut mengalami kondisi penurunan usaha. Sektor usaha dan kemampuan adaptasi menjadi penentu untung rugi di kala pandemi ini. Mereka yang bergerak pada sektor industri jamu, alat kesehatan, maupun farmasi lainnya menjadi Top Most Wanted oleh pelanggan. Tak kalah, sektor jasa logistik, makanan, dan minuman menuai untung dalam pandemi ini. Serta, mereka yang telah terbiasa melakukan transaksi secara daring baik melalui situs pribadi, situs marketplace, media sosial, maupun lewat aplikasi pesan antar lainnya mendapatkan berkah yang melimpah dikarenakan pelanggan mengurangi aktivitas untuk mendatangi lokasi toko/usaha.

Bisnis online adalah suatu kegiatan (aktifitas) yang dilakukan di media internet untuk menghasilkan uang. Seperti halnya sebuah kegiatan bisnis di kehidupan nyata, bisnis online yang dijalankan via internet ini pun memiliki tujuan yang sama yaitu menghasilkan keuntungan (Arisandy, 2017). Permasalahannya transaksi bisnis online tidak mudah dikenai pajak, karena dengan Self Assessment System pada sistem perpajakan Indonesia yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak, lebih menekankan pada kesadaran wajib pajak itu sendiri untuk membayar pajak atas penghasilan yang diperoleh dari usahanya. Hal ini dikarenakan pada transaksi bisnis online UMKM, para pelaku UMKM ini belum mampu menjelaskan berapa besar pendapatan yang diperoleh dalam bisnisnya dengan berbagai keterbatasan. Hal ini dikarenakan terdapat salah satu kendala yaitu dalam transaksi bisnis online hanya disertai dengan bukti transfer uang yang memperlihatkan beralihnya uang dari rekening pihak pertama ke rekening pihak lain, dan belum menunjukkan bukti terjadinya transaksi jual beli yang dikenakan pajak, ini merupakan salah satu alasan UMKM perlu diberikan pemahaman tentang pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan pengajaran yang bertujuan untuk:

1. Meningkatkan ketrampilan pengenalan transaksi dan proses pencatatan digital dengan menggunakan aplikasi sehingga mempermudah laporan aktivitas bisnisnya;

2. Mampu membuat keputusan pembelanjaan sesuai kebutuhan;
3. Meningkatkan pemahaman UMKM terhadap pajak; manfaat dan kebaikan sebagai Wajib Pajak sehingga meningkatkan kepatuhan pajak.
4. Meningkatkan kemampuan UMKM tentang pemahaman digitalisasi bisnis sehingga mampu bersaing dalam kondisi bisnis berbasis teknologi.

Kontribusi pengabdian ini bagi UMKM diharapkan dapat memberi berbagai pengetahuan literasi digitalisasi yang diharapkan dapat membantu UMKM dalam menjalankan bisnis/usahanya. Berikut ini adalah beberapa kontribusi pengabdian Literasi digitalisasi keuangan, pajak dan bisnis, sebagai berikut:

1. Memberi pemahaman tentang konsep pengelolaan keuangan berbasis IT;
2. Memberi pengetahuan tentang konsep pajak, manfaat dan prosedur dan tata cara pengisian e-spt;
3. Memberi pelajaran tentang bagaimana mempersiapkan bisnis di era teknologi informasi;
4. Melakukan pendampingan dan pembelajaran berkesinambungan melalui konsultasi menggunakan *Whatsapp* tentang literasi keuangan, pajak dan bisnis.
5. Memberikan pemahaman tentang pola pengelolaan keuangan antara modal, kerja, pendapatan dan investasi.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Literasi Keuangan

Menurut lembaga Otoritas Jasa Keuangan (2013) menyatakan bahwa Literasi keuangan atau Financial Literacy adalah tingkat pengetahuan, keterampilan, keyakinan masyarakat terkait lembaga keuangan serta produk dan jasanya yang dituangkan dalam parameter ukuran indeks (Otoritas Jasa Keuangan, 2014). OJK menyatakan bahwa misi penting dari program literasi keuangan adalah untuk melakukan edukasi dibidang keuangan kepada masyarakat Indonesia agar dapat mengelola keuangan secara cerdas, supaya rendahnya pengetahuan tentang industri keuangan dapat diatasi dan masyarakat tidak mudah tertipu pada produk-produk investasi yang menawarkan keuntungan tinggi dalam jangka pendek tanpa mempertimbangkan risikonya.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan literasi berarti kesanggupan membaca dan menulis. Dalam hal finansial, literasi keuangan dapat diartikan sebagai kecakapan atau kesanggupan dalam hal keuangan. Otoritas Jasa Keuangan pernah mengadakan survei pada tahun 2013 untuk menilai tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia. Selanjutnya Manurung (2009) mengartikan literasi keuangan sebagai seperangkat keterampilan dan pengetahuan yang memungkinkan seorang individu untuk membuat keputusan dan efektif dengan semua sumber daya keuangan mereka.

Dari pengertian di atas dapatlah dikatakan bahwa Literasi keuangan membantu dalam

memberikan pemahaman tentang mengelola keuangan dan peluang untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera dimasa yang akan datang. Literasi keuangan sangat penting untuk seseorang dalam membuat keputusan terutama yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari seperti dalam mengambil keputusan untuk menabung (saving) atau investasi (Investment) untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Literasi keuangan selain bermanfaat bagi individunya sendiri juga bermanfaat untuk keberlangsungan sistem perekonomian suatu Negara.

Untuk memastikan pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan, program strategi nasional literasi keuangan mencanangkan tiga pilar utama. Pertama, mengedepankan program edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan. Kedua, berbentuk penguatan infrastruktur literasi keuangan. Ketiga, berbicara tentang pengembangan produk dan layanan jasa keuangan yang terjangkau. Penerapan ketiga pilar tersebut diharapkan dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi sehingga masyarakat dapat memilih dan memanfaatkan produk jasa keuangan guna meningkatkan kesejahteraan.

Pelaksanaan Edukasi dalam rangka meningkatkan keuangan masyarakat sangat diperlukan karena berdasarkan survei yang dilakukan oleh OJK pada 2013, bahwa tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

1. *Well literate* (21,84 %), yakni memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

2. *Sufficient literate* (75,69 %), memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.

3. *Less literate* (2,06 %), hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan.

4. *Not literate* (0,41%), tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

Pendidikan literasi keuangan diharapkan agar masyarakat luas dapat menentukan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan, masyarakat harus memahami dengan benar manfaat dan risiko, mengetahui hak dan kewajiban serta meyakini bahwa produk dan layanan jasa keuangan yang dipilih dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagi masyarakat, literasi keuangan memberikan manfaat yang besar, seperti:

1. Mampu memilih dan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai

kebutuhan;

2. Memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan keuangan dengan lebih baik;
3. Terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas;

Mendapatkan pemahaman mengenai manfaat dan risiko produk dan layanan jasa keuangan. Literasi Keuangan juga memberikan manfaat yang besar bagi sektor jasa keuangan. Lembaga keuangan dan masyarakat saling membutuhkan satu sama lain sehingga semakin tinggi tingkat Literasi Keuangan masyarakat, maka semakin banyak masyarakat yang akan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan.

2.2 Aspek-Aspek Literasi Keuangan

Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan hakikat pembangunan nasional. Tingkat kesejahteraan masyarakat ini mencerminkan kualitas hidup dari sebuah keluarga. Keluarga dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi berarti memiliki kualitas hidup yang lebih baik, sehingga pada akhirnya keluarga tersebut mampu untuk menciptakan kondisi yang lebih baik untuk bisa meningkatkan kesejahteraan mereka (Rosni, 2012)

Pemahaman literasi keuangan memberi manfaat dasar bagi masyarakat tentang bagaimana pengelolaan keuangan yang baik dan benar. Chen dan Volpe (Ulfatun et al, 2016) membagi literasi keuangan menjadi empat aspek, yaitu:

1. Pemahaman beberapa hal yang berkaitan dengan pengetahuan dasar tentang keuangan pribadi.
2. *Savings and borrowing* (tabungan dan pinjaman), bagian ini meliputi pengetahuan yang berkaitan dengan tabungan dan pinjaman seperti penggunaan kartu kredit.
3. *Insurance* (asuransi), bagian ini meliputi pengetahuan dasar asuransi, dan produk-produk asuransi seperti asuransi jiwa dan asuransi kendaraan bermotor.
4. *Investment* (investasi), bagian ini meliputi pengetahuan tentang suku bunga pasar, reksadana, dan risiko investasi.

Sedangkan Nababan dan Sadalia (Budiono, 2012) membagi literasi keuangan terbagi menjadi lima aspek pemahaman, yaitu:

1. *Basic Personal Finance*. Hal ini mencakup berbagai pemahaman dasar seseorang dalam suatu sistem keuangan seperti perhitungan bunga sederhana, bunga majemuk, inflasi, opportunity cost, nilai waktu, likuiditas aset, dan lain-lain.
2. *Money Management* (pengelolaan uang). *Money management* mempelajari bagaimana seorang individu mengelola uang pribadi mereka. Semakin banyak pemahaman mengenai financial literacy maka semakin baik pula individu tersebut mengelola uang pribadi mereka.
3. *Credit and debt management*. Manajemen perkreditan adalah suatu rangkaian kegiatan dan

komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain secara sistematis dalam proses pengumpulan dan penyajian informasi perkreditan suatu bank.

4. *Saving and investment*. Tabungan (*saving*) merupakan bagian dari pendapatan masyarakat yang tidak dipergunakan untuk kegiatan konsumsi, sedangkan bagian dari tabungan yang dipergunakan untuk kegiatan ekonomi (menghasilkan barang dan jasa) yang menguntungkan disebut dengan investasi (*investment*).

5. *Risk management*. Risiko adalah sesuatu yang muncul akibat adanya suatu ketidakpastian. Manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko sehingga kerugian yang dialami dapat diminimalisir atau keuntungan yang akan diperoleh dapat dioptimalkan.

Aspek literasi keuangan secara lebih luas mampu memberi pengetahuan tentang bagaimana masyarakat mampu untuk memahami dengan baik nilai nominal uang, nilai tukar uang, fitur jasa layanan leuagan, proses pencatatan keuangan, bersikap dalam menentukan pengeluaran, tidak hanya bagi dirinya tapi juga mampu menularkan pemahaman pengetahuannya kepada masyarakat lainnya. Pentingnya literasi keuangan ditanamkan sejak dini sehingga pola konsumtif data dicegah sejak dini, UMKM mulai memikirkan tentang pola investasi jika memiliki laba atau profit yang lebih sehingga konsep pengembangan usaha dapat tercapai.

Pemahaman yang diberikan secara sederhana dan dipraktekkan secara langsung pada UMKM dan Mitra pendamping sehingga dapat menjadi bagian penting dalam implementasi edukasi keuangan. Setiap bisnis/usaha mengalami pasang surut begitu juga UMKM terutama saat Pandemi Covid -19 sehingga pola pengelolaan keuangan menjadi bagian penting jika mau bertahan, untuk itu setiap UMKM diharapkan mengetahui dengan tepat jumlah keuntungan dan modal kerja yang perlu disiapkan untuk pengembangan bisnisnya ke depan.

2.3 Literasi Pajak

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor paling penting dalam perekonomian. UMKM berkontribusi setidaknya sebesar 60% dalam menciptakan lapangan pekerjaan di berbagai negara (OECD, 2019). Melihat peran yang cukup besar, strategi untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM dan mengurangi biaya kepatuhannya menjadi penting.

Pembahasan mengenai kedua strategi tersebut diuraikan secara komprehensif dalam publikasi ilmiah yang berjudul *Tax Administration: Supporting SMEs to Get Tax Right Series: Strategic Planning*. (Oliver Petzold dan Peter Green) tulisan tersebut diterbitkan pada 2020 oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)*. desain administrasi pajak berperan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM sekaligus mengurangi biaya dalam menegakkan kepatuhan pajaknya. Saat ini Kanwil Pajak mulai sering melakukan sosialisasi pajak kepada UMKM dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Secara umum, terdapat 3 tahapan yang diulas (Herdona, 2021), yaitu: Pertama, pengembangan strategi perencanaan secara matang. Petzold dan Green menjelaskan terdapat beberapa proses yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan strategi perencanaan tersebut. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah menetapkan tujuan dari strategi yang dijalankan. Setelah memetakan tujuannya, otoritas pajak juga harus memahami bagaimana cara kerja UMKM. Pemahaman tersebut berguna untuk melakukan identifikasi cara mengurangi biaya kepatuhan dan biaya administrasi.

Kedua, proses implementasi atas perencanaan yang telah disusun. Dalam menerapkan rencana yang telah dibuat, perlu adanya dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Dalam hal ini, komunikasi antarpihak, baik UMKM, otoritas pajak, maupun pihak lainnya, menjadi kunci keberhasilan untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM. Ketiga, evaluasi atas perencanaan dan proses implementasi. Setelah strategi diterapkan, penting untuk menilai apakah strategi yang dijalankan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kemampuan otoritas pajak menjalankan proses perencanaan untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM dengan baik adalah adanya ketersediaan dana untuk mendukung proses implementasi strategi peningkatan kepatuhan. Selain itu, budaya pada setiap organisasi yang terlibat dalam implementasi strategi juga merupakan hal penting yang perlu diperhatikan, yang perlu diingat keterbukaan dan transparansi menjadi salah satu kunci keberhasilannya.

Di Indonesia, strategi perpajakan untuk UMKM dilakukan melalui program Business Development Services (BDS), melalui program ini, pemerintah berupaya mengembangkan bisnis UMKM melalui berbagai kegiatan. Tujuan dari program tersebut ialah meningkatkan pengetahuan perpajakan UMKM dan mencari tahu mengenai peredaran usaha mereka. Edukasi pajak juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pajak, keterikatan dengan masalah perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan pajak segmen wajib pajak tersebut.

2.4 Literasi Digitalisasi Bisnis

UMKM yang ada di Indonesia memiliki sumbangsih luar biasa bagi perekonomian dalam negeri. Tercatat pada tahun 2020, terdapat lebih dari 64 juta pelaku UMKM di Indonesia. Tumbuh suburnya UMKM di Indonesia menyerap 117 juta pekerja di dalamnya, dan setidaknya 97% para pekerja di Indonesia bekerja pada sektor ini. Selain itu, pada tahun 2019 sendiri, kontribusi UMKM terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) mencapai lebih dari 60%. Angka ini terus tumbuh setidaknya selama 5 tahun terakhir, dan merosot tajam menjadi kurang dari 35% akibat pandemi covid-19 yang menghantam Indonesia sejak awal tahun 2020.

Mengingat pentingnya UMKM bagi penyerapan tenaga kerja dan terbukanya peluang bisnis

di era pandemic -19 maka upaya untuk meningkatkan bisnis UMKM pada saat PPKM adalah melalui pengenalan digitalisasi bisnis sehingga usaha setiap UMKM dapat tetap bertahan dan bersaing di masa Pendemic maupun sesudahnya.

Saat ini pemerintah membuat program untuk melakukan digitalisasi bisnis UMKM yang ada di Indonesia. Digitalisasi bisnis ini bertujuan agar UMKM diharapkan mampu untuk mendorong daya saing dan daya jual UMKM yang ada di Indonesia sebagai akibat pandemi yang terjadi, dan juga meningkatkan kontribusi yang dimiliki oleh UMKM terhadap perekonomian dalam negeri. Perlu dipahami bahwa digitalisasi bisnis bukanlah sekedar menggunakan teknologi secara sederhana dan cenderung tanpa arah di dalamnya, digitalisasi bisnis tidak sekedar menjual dan memasarkan produk melalui smartphone ataupun gadget yang dimiliki. Digitalisasi bisnis dan transformasi digital merupakan Proses transformasi bisnis dengan menggunakan bentuk teknologi digital di dalamnya.

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa digitalisasi bisnis merupakan konsep transformasi dari pengelolaan bisnis tatap muka dalam proses penjualan menjadi proses bisnis dan transaksi pembelian tanpa tatap muka sehingga pelaku UMKM perlu memahami konsep digitalisasi bisnis tidak hanya sekedar menjual dengan menggunakan smartphone tetapi juga proses pencatatan transaksi, proses pembayaran dan juga perhitungan persediaan barang jual mengalami perubahan ke arah digitalisasi, sehingga pengenalan aplikasi bisnis sederhana seperti aplikasi buku kas, aplikasi buku persediaan, pengenalan transaksi *mobile banking*, *charge delivery* dan membangun jejaring dengan unit bisnis pengiriman barang.

Indonesia tergolong sebagai negara dengan rendahnya akses yang dimiliki oleh masyarakat terhadap Internet. Mengacu data dari World Bank, hanya 48% masyarakat Indonesia yang memiliki akses dan dapat memanfaatkan bentuk teknologi ini. Hal ini menjadikan Indonesia berada di bawah Kamboja, Thailand, Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Singapura, sehingga tidak mengherankan jika UMKM kita tertinggal dari beberapa negara tetangga tersebut.

Upaya literasi digitalisasi bisnis merupakan hal penting untuk meningkatkan kemampuan UMKM. Program E-Smart IKM (Industri Kecil dan Menengah) yang diperkenalkan Kementerian Perindustrian merupakan salah satu program yang diharapkan mampu mendorong para pelaku UMKM untuk memasarkan produk yang dimiliki melalui *platform e-commerce*, dan proses pembelajaran diperlukan untuk mensukseskan program digitalisasi bisnis UMKM ini.

Digitalisasi bisnis juga menjadi catatan penting bahwa fungsi dan peran digitalisasi bisnis adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis yang dijalankan, hingga meningkatkan *product value* yang dijual kepada para konsumen dan menambah kemakmuran bagi para pelaku usaha itu sendiri, sehingga, digitalisasi bisnis perlu dipersiapkan sebelum kegiatan produksi dijalankan. Digitalisasi bisnis harus diupayakan dimulai dari adanya inovasi yang dimiliki oleh

UMKM, inovasi dalam memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia baik untuk desain produk, kecepatan pelayanan, kualitas produk, pelayanan pengiriman produk juga untuk pengelolaan keuangan.

3. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Sasaran kegiatan ini adalah pengusaha UMKM di Kota Jayapura dan mahasiswa KKN Jurusan Akuntansi FEB Universitas Cenderawasih. Kegiatan pengabdian dilaksanakan secara online pada tanggal 18 September 2021 Jam 09.00 – 17.00 WIT, kegiatan ini akan dibagi dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama pengenalan dan pemberian materi dilakukan secara online dan pendampingan dilakukan melalui konsultasi secara kontinyu melalui group Whatsapp untuk permasalahan digitalisasi UMKM. Selain itu kegiatan ini juga dibantu oleh mahasiswa KKN untuk melakukan pendampingan di lapangan. Berikut adalah link pendaftaran kegiatan online Pengabdian Pada Masyarakat: <http://linktr.ee/maksiuncen>. Link zoom kegiatan: meeting ID 856 2166 5335 dengan Passcode: 18092021.

Pelaksanaan kegiatan ini menggunakan metode pembelajaran dan pendampingan, serta konsultasi bisnis melalui group *Whatsapp*. Lingkup kegiatan prosesnya tersusun dalam susunan kegiatan sebagai berikut: 1) Rapat kegiatan untuk menentukan metode kegiatan, narasumber, materi dan sasaran kegiatan pengabdian. 2) Pengurusan administrasi dan menyiapkan pelaksanaan kegiatan, membagi flyer kegiatan dan proses pendaftaran peserta. 3) Focus group discussion (FGD) antara ketua Tim Pelaksana dengan narasumber untuk mendiskusikan proses dan metode pengajaran yang tepat. 4) Pelaksanaan kegiatan (pemutaran video pajak, penyampaian materi, diskusi dan Tanya jawab). 5) Evaluasi kegiatan (tanggapan peserta).

Jumlah peserta pengabdian pada masyarakat digitalisasi literasi keuangan, pajak dan bisnis bagi UMKM adalah 48 peserta dengan narasumber kegiatan sebanyak 4 orang:

1. Steven Warno (Asisten Penyuluh Pajak Penyelia KPP Pratama Jayapura
2. M. Agung Baskoro (Asisten Penyuluh Pajak terampil KPP Pratama Jayapura
3. Dr. Meinarni Asnawi, SE.M.Si.,CBV., CMA
4. Kurniawan Patma, SE.M.Ak., CAP., CRP.

Pelaksanaan dibagi dalam tiga (3) tahap pelaksanaan dengan waktu yang berbeda, tahapan pelaksanaan terdiri dari: 1) Pemberian pemahaman pengetahuan tentang digitalisasi literasi keuangan, pajak dan bisnis, pada tahapan peserta dari UMKM dan Mahasiswa KKN belajar tentang pengelolaan keuangan dan bisnis berbasis IT dan tahapan pemahaman pajak dan prosedur pendaftaran NPWP secara online dan cara pengisian e-SPT. 2) Tahap konsultasi pengelolaan keuangan dan bisnis melalui Group konsultasi bisnis yang dibuat untuk pendampingan konsultasi keuangan, bisnis dan pajak. 3) Bantuan pendampingan pencatatan keuangan berbasis IT oleh

Mahasiswa KKN sebagai bentuk proses pembelajaran mitra.

4. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

4.1 Agenda Kegiatan

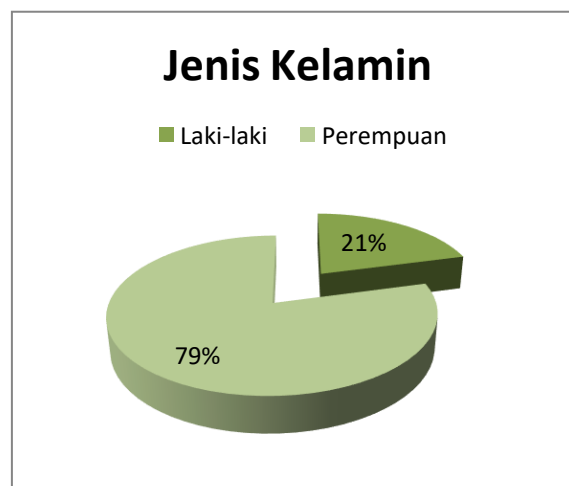
Sesuai dengan jadwal waktu pelaksanaan event yang direncanakan, maka agenda pelaksanaan event ini adalah sebagai berikut.

Kegiatan literasi digitalisasi keuangan, pajak dan bisnis bagi UMKM dan Mahasiswa KKN dilaksanakan melalui Virtual online selama 8 jam yaitu dari jam 09.00 – 17.00 WIT dengan 4 materi (jadwal kegiatan terlampir), sedangkan kegiatan pendampingan mahasiswa KKN penekanannya pada monitoring dan evaluasi hasil kegiatan pada UMKM yang mengikuti kegiatan. Kegiatan diawali dengan pemutaran video etika Wajib Pajak yang telah disiapkan, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran para peserta tentang pentingnya menjadi wajib Pajak. Berikut ini adalah link video etika pajak yang ditampilkan saat awal kegiatan virtual kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat :

<https://drive.google.com/file/d/1J4B3bKrdW0ucnmYvfeWIRI9N6xs5Taj/view?usp=sharing>

4.2 Target Output

Kegiatan ini diikuti oleh 48 peserta yang terlihat pada karakteristik jenis kelamin dengan rincian peserta Laki-laki 10 peserta (21%) dan Perempuan 38 (79%) peserta. Berikut Chart/gambar jenis kelamin dari peserta PKM:



Gambar 1 Jenis Kelamin Peserta PKM

Sumber : Data Diolah, (2021)

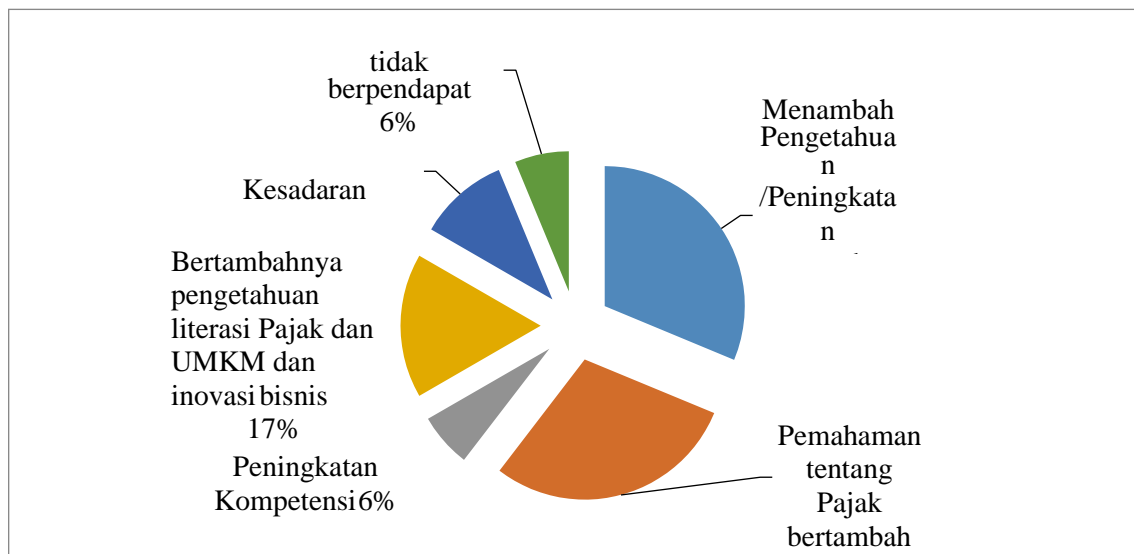
Hasil gambar di atas menunjukkan bahwa sebagian peserta adalah berjenis kelamin. Setelah sesi kegiatan selesai, peserta diminta untuk mengisi daftar hadir dan memberikan

tanggapan atas pemberian materi pelatihan oleh narasumber dan juga manfaat dari kegiatan PKM. Berikut ini adalah hasil tanggapan peserta saat dilakukan sesi pembelajaran yang dikelompokkan dalam lima (5) kelompok pendapat, seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1 Pendapat Peserta PKM

Pendapat Peserta	Jumlah	Presentasi
Peningkatan pengetahuan & wawasan	15	31%
Peningkatan Pemahaman tentang Pajak	14	29%
Peningkatan Kompetensi	3	6%
Peningkatan Pengetahuan literasi Pajak dan UMKM dan inovasi bisnis	8	17%
Kesadaran Pajak	5	10%
Tidak berpendapat	3	6%
Jumlah	48	100%

Sumber: *link online virtual (link absensi dan tanggapan pada lampiran)*



Gambar 4.2 Pendapat Peserta Setelah Mengikuti Kegiatan

Sumber : Data Diolah, (2021)

Dari tabel 4.1, jumlah peserta yang bertanya cukup banyak (40%), dengan kisaran pertanyaan kurang lebih berkaitan dengan enam (6) kategori seperti yang terlihat pada tabel 4.1 dan gambar 2. Penjelasan yang diberikan narasumber telah memberi wawasan tambahan. Bagi peserta yang tidak dapat bertanya pada sesi kegiatan virtual, dapat mengikuti sesia Tanya jawab pada group WA yang telah disediakan maupun melalui mahasiswa KKN sebagai pendamping mitra.

Para peserta berharap kegiatan seperti dapat dilanjutkan pada sesi pertemuan lainnya dengan materi pengembangan pengetahuan digitalisasi keuangan dan bisnis terutama

pembinaan langsung kepada UMKM Papua. Peserta juga berharap dapat dibentuk kelompok binaan UMKM sehingga pemberian pengetahuan dapat dilakukan secara berkesimbangan tidak berhenti hanya saat pemberian materi dan pendampingan mitra bersama mahasiswa KKN. Berikut ini adalah rangkuman pendapat peserta terkait pelaksanaan kegiatan:

Tabel 4.2 Tanggapan Peserta PKM

Tanggapan Peserta PKM	Jumlah	Presentasi
Great Job (Sangat Baik)	25	52%
Baik Sekali	10	21%
Sangat Bermanfaat	7	15%
Baik tetapi perhatikan aspek teknis kegiatan (gangguan audio, gangguan suara peserta lain)	4	9%
Tidak Berpendapat	4	9%
Jumlah	48	100%

Sumber: *link online virtual (link absensi dan tanggapan pada lampiran)*

Dari tabel di atas nampak terlihat bahwa penyelenggaraan kegiatan ini dianggap telah memenuhi tingkat penyelenggaraan kegiatan sangat baik (52%), walaupun terdapat beberapa peserta merasa terganggu dengan gangguan teknis jaringan ditempatnya sehingga tidak bisa mengikuti dengan baik, juga gangguan suara dari peserta lain karena tidak mematikan audionya, setiap masukan ini akan menjadi bahan masukan untuk penyelenggaraan berikutnya. Berikut ini adalah tanggapan peserta untuk kegiatan selanjutnya yang diusulkan oleh beberapa peserta dapat dirangkum berikut ini:

Tabel 4.3 Saran Kegiatan

Saran Kegiatan Peserta PKM	Jumlah	Presentasi
Membuat kegiatan yang sama lebih sering & Kontinyu	20	42%
Melakukan Pembinaan langsung kepada UMKM Papua	10	21%
Membuat Kelompok Binaan UMKM	8	17%
Tidak Menyampaikan saran	10	21%
Jumlah	48	100%

Sumber: *closing statement peserta dan pendapat peserta pada link absen & tanggapan*

Informasi yang disampaikan pada tabel 4 menjadikan masukan bagi penyelenggara pengabdian untuk mengakomodir usulan peserta pada kegiatan pengabdian di waktu mendatang, termasuk untuk membentuk kelompok binaan usaha UMKM Papua sehingga mampu bersaing dan mengembangkan usaha di waktu yang akan datang.

Dari tabel dan gambar di atas terdapat 3 peserta atau 6% peserta yang tidak memberi

pendapat pada link absen, sedangkan yang memberikan pendapat sebanyak 45 perempuan yaitu sebanyak 79%.

4.3 Pengaturan *Monitoring Output*

Untuk mencapai indikator hasil yang telah ditetapkan (baik secara kualitas maupun kuantitas) dan kesuksesan pelaksanaan kegiatan maka proses monitoring dan evaluasi dilakukan dengan cara:

- a. Menyampaikan undangan (pemberitahuan) kepada peserta dan narasumber lebih awal (seminggu sebelumnya).
- b. *Mereview* daftar undangan sebelum *event* dimulai.
- c. *Mereview* daftar hadir peserta pada saat *event* berlangsung (daftar hadir diambil dalam dua sesi yaitu sesi awal masuk dan sesi akhir untuk memastikan peserta tidak pulang sebelum kegiatan selesai).
- d. Melakukan pemantauan pada saat pelaksanaan setiap kegiatan dan memastikan keterlibatan para pihak dalam kegiatan yang dilaksanakan.

4.4 Sasaran Kegiatan

Kegiatan literasi digitalisasi keuangan, pajak dan bisnis bagi UMKM dan Mahasiswa KKN dilaksanakan melalui *virtual online* dengan 4 materi (jadwal kegiatan terlampir), sedangkan kegiatan pendampingan mahasiswa KKN penekanannya pada monitoring dan evaluasi hasil kegiatan pada UMKM yang mengikuti kegiatan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat maka dapat disimpulkan sebagaiberikut:

1. Kegiatan Literasi digitalisasi keuangan, pajak dan bisnis sebagai upaya optimalisasi kompetensi UMKM di Kota jayapura telah dilakukan dengan mendapat perhatian yang sangat baik dari peserta dengan meminta kegiatan yang sama dapat dilakukan lagi di waktu mendatang
2. Kegiatan Literasi digitalisasi keuangan dan bisnis sebagai upaya optimalisasi kompetensi UMKM di Kota jayapura memberi bahasan pembelajaran tentang digitalisasi pengelolaan keuangan dan bisnis, serta digitalisasi pajak.
3. Kegiatan digitalisasi literasi pajak menyampaikan pemahaman tentang kesadaran pajak, manfaat pajak dan tata cara pendaftaran Wajib Pajak secara online dan pengisian/pelaporan pajak melalui e-spt.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, sebaiknya kegiatan pelatihan dan pembelajaran dapat dilakukan dengan durasi waktu lebih panjang dan disesuaikan dengan ketersediaan waktu peserta. Selain itu, menyediakan pendampingan melalui pembentukan kelompok binaan dan dilakukan secara kontinyu. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran daring perlu memperhatikan teknis pelaksanaan, mengurangi gangguan audio dan juga memperhatikan kondisi jaringan. Terakhir, perlu menyediakan materi pembelajaran sebelum kegiatan dilaksanakan sehingga peserta memahami pembelajaran dengan lebih mudah.

Daftar Pustaka

[Artikel Literasi Pajak - DDTc News](#)

Budiono, Tania. 2014. *Keterkaitan Financial Attitude, Financial Behaviour & Financial Knowledge pada Mahasiswa Strata 1 Universitas Atmajaya Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.

[Enam Literasi Dasar yang Perlu dikuasai \(kemdikbud.go.id\)](#)

Herdona, S. A. (2021, september 28). <https://news.ddtc.co.id/literasi>

Manurung, Adler H dan Rizky, Lutfi T. 2009. *Successful Financial Planner: A Complete Guide*. Jakarta: Grasindo.

Muchlis Riyadi (2018) Pengertian, Tingkat, Aspek dan Pengukuran Literasi Keuangan (<https://www.kajianpustaka.com/2018/03/>).

[Otoritas Jasa Keuangan | Seri Literasi Keuangan \(ojk.go.id\)](#)

[Pandemi, Literasi, dan Pajak | Direktorat Jenderal Pajak](#)

Remund, David L. 2010. *Financial Literacy Explicated: The Case for a Clearer Definition in an Increasingly Complex Economy*. The Journal of Consumer Affairs Vol.44 No.2.